

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai dasar dalam penyusunan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis. Kajian yang digunakan yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung (Studi Pada Jl. Lengkong Kecil) . Berikut ini adalah Tabel penelitian terdahulu yang mendukung penelitian penulis :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Variabel
1.	Pribawana, Reggy; Kurniadi, Oji Strategi Komunikasi Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mensosialisasikan Mesin Parkir Elektronik	Strategi Komunikasi
2.	Ulfi Nur Dwi Utami 2018 Efektivitas Program Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung (Studi Pada Jalan Leuwipanjang) Skripsi	Efektivitas Program

1. Pribawana, Reggy, Kurniady dan Oji dengan judul Strategi Komunikasi Dinas Perhubungan Kota Bandung Dalam Mensosialisasikan Mesin Parkir Elektronik. Penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan yaitu dalam hal variabel yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel strategi komunikasi sedangkan pada penelitian yang dilakukan menggunakan variabel implementasi kebijakan dengan menggunakan parameter dari Merile S. Grindle
2. Ulfi Nur Dwi Utami (2018) Efektivitas Program Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung (Studi Kasus Pada Jalan Leuwi Panjang) Penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan yaitu dalam hal variabel yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel efektivitas sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel implementasi kebijakan dengan menggunakan parameter dari Merile S. Grindle. Hasil Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa melalui parameter efektivitas mesin parkir elektronik di Kota Bandung khususnya di Jl. Leuwi Panjang dinilai tidak efektif, hal tersebut diindikasikan dengan banyaknya pengguna parkir bahu jalan yang masing-masing membayar biaya parkir bahu jalan melalui Juru Parkir baik Juru Parkir Legal maupun Ilegal,

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan

pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Budi Winarno (2008:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Istilah kebijakan memang sering dipergunakan dalam konteks tindakan – tindakan atau kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh para aktor dan institusi – institusi pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Makna kebijakan akan semakin jelas bila dilihat pada pandangan dari beberapa ahli mengenai

kebijakan. Menurut **Dunn dalam Pasolong (2013:39)** menyatakan bahwa kebijakan publik yaitu :

Suatu rangkaian pilihan – pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang – bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain – lain.

Definisi selanjutnya mengenai kebijakan menurut **Fredrich (Suyatna, 2009:3)** yaitu sebagai berikut :

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan – kesulitan dan kemungkinan – kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Definisi yang diberikan oleh Friedrich ini menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu. Selain itu, gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud yang layak mendapatkan perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai bagian definisi kebijakan publik yang penting, sekalipun maksud atau tujuan dari tindakan – tindakan pemerintah yang dikemukakan dalam definisi ini mungkin tidak selalu mudah dipahami.

Definisi yang diberikan oleh Friedrich ini menyangkut dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu. Selain itu, gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud yang layak mendapatkan perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai bagian

definisi kebijakan publik yang penting, sekalipun maksud atau tujuan dari tindakan – tindakan pemerintah yang dikemukakan dalam definisi ini mungkin tidak selalu mudah dipahami.

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan hanyalah merupakan dokumen belaka, oleh sebab itu tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bagi mereka yang melihat kebijakan publik dari perspektif *policy cycle* (siklus kebijakan), implementasi kebijakan itu merupakan suatu aktifitas yang paling penting. Tetapi, tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa setiap kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya, seolah aktivitas implementasi kebijakan tersebut menyangkut sesuatu yang tinggal jalan. Realita menunjukkan, implementasi kebijakan itu sejak awal melibatkan sebuah proses rasional dan emosional yang teramat kompleks. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan **Bardach** dalam **Agustino (2014:138)**, yaitu :

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata – kata dan slogan – slogan yang kedengarannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

Gordon dalam **Pasolong (2013:58)** mengatakan bahwa implementasi kebijakan berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah direalisasikan.

Mengorganisir berarti mengatur sumber daya unit – unit dan metode – metode untuk melaksanakan program. Menginterpretasikan berkenaan dengan mendefinisikan istilah – istilah program dalam rencana – rencana dan petunjuk – petunjuk yang dapat diterima feasible. Menerapkan berarti berarti menggunakan instrumen – instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran – pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan – tujuan program.

Dalam derajat lain **Mazmanian dan Sabatier** dalam **Agustino (2014:139)** mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut :

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang – undang, namun dapat pula berbentuk perintah – perintah atau keputusan – keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan **Grindle (1980: 7)** bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan **Van Meter dan van Horn** yang dikutip oleh **Parsons (1995: 461)** dan **Wibawa, dkk., (1994: 15)** bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan.

Berdasarkan rumusan implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan diatas, maka implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak/akibat bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program. Menurut **Lester dan Stewart dalam Agustino (2008: 196)** mengatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan sebagai tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi kebijakan diartikan sebagai pengadministrasian undangundang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut.”

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Menurut **Bressman dan Wildansky dalam Agustino (2008: 198)** menyatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan. Implementasi kebijakan merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan-tujuan

kebijakan sedangkan pada tahap implementasi kebijakan, tindakan (*action*) diselenggarakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.”

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan

Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi variabel besar, yakni:

a) Isi kebijakan (*content of policy*), yang mencakup:

(1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan, (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, (4) apakah letak sebuah program sudah tepat, (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya secara rinci, (6) apakah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

b) Lingkungan implementasi (*context of implementation*), mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan,kepentingan,dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan, (2) karakteristik institusi dalam rejim yang sedang berkuasa, (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini penelitian dapat menjelaskan variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

1) Isi kebijakan (*content of policy*), yang mencakup:

a) Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.

Dalam pengertian ini, kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan oleh masyarakat atau kelompok untuk memecahkan masalah yang terjadi di kehidupannya. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat atau

kelompok banyak sekali masalah yang membelenggu dan butuh kebijakan yang dibuat pemerintah. Disini kebijakan yang sangat dibutuhkan harus terlaksana agar mengeluarkan masyarakat dari masalah tersebut.

b) Jenis manfaat yang diterima oleh target group.

Suatu kebijakan adalah upaya untuk memperbaiki keadaan, jika keadaan yang diterima masyarakat atau kelompok tidak jauh berbeda dari sebelumnya, maka manfaat dari kebijakan tersebut tidak ada.

c) Perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.

Kebijakan publik yang berhasil bukan dinilai dari isinya yang prestisius namun implementasinya di lapangan. Apakah mampu membawa perubahan yang baik atau malah sebaliknya.

d) Ketepatan sebuah program.

Sebuah program kebijakan harus tepat agar nanti dalam implementasinya berhasil sesuai dengan harapan. Tepat disini meliputi, tepat sasaran, tepat kebutuhan, tepat lingkungan dan tepat guna.

e) Rincian implementor kebijakan.

Kebijakan yang sudah dibuat tidak bisa dinilai keberhasilannya tanpa ada implementor atau pelaksananya. Karena peran implementor sangat penting, tanpa mereka implementasi kebijakan tidak berjalan. Implementor tak cuma satu tapi ada beberapa, maka harus lengkap karena masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda yang saling melengkapi.

- f) Dukungan dari sumber daya yang memadai.

Sumber daya manusia (implementor) harus memadai dan tahu peran dan fungsinya secara baik agar tidak keliru. Selain itu sumber daya modal harus sesuai kemampuan agar tidak terjadi kekurangan uang untuk menunjang implementasi kebijakan.

- 2) Lingkungan implementasi (*context of implementation*), mencakup:

- a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat didalam implementasi kebijakan.

Dalam hal ini para aktor kebijakan yang jumlahnya lebih dari satu pasti memiliki pemikiran yang beraneka ragam. Sehingga masing-masing memiliki kepentingan dan strategi yang berbeda. Karena mereka terikat pada jabatan yang mereka punya. Sehingga berdampak pada kebijakan yang dibuat. Besar kecilnya tersebut ditentukan oleh jabatan yang mereka duduki.

- b) Karakteristik institusi dalam rezim yang sedang berkuasa.

Dalam politik negara nama rejim itu tergantung pada penguasa negara yang sedang menjabat. Maka perilaku dan sifat pemimpin negara dapat dilihat pada kebijakan yang dibuat. Dalam suatu rezim, institusi selaku kaki tangan kepala negara maka akan sangat nurut dengan kepala negara dan sistem yang ditentukan kepala negara.

- c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dalam impementasi kebijakan publik, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena perilaku masyarakat (kelompok sasaran) sangat menentukan

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

Menurut Warsito (2001:128) pendapatan asli daerah yaitu :

“Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan menurut **Herlina Rahman(2005:38)**

“Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.”

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)

2.2.5 Tipe Parkir

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung pada kendaraan dan kebutuhan atau Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktur Jendral Perhubungan Darat, 1998).

Tipe Parkir ada 2 macam yaitu sebagai berikut:

1. Parkir Diluar Badan Jalan (*off street parking*)

Fasilitas parkir di luar badan jalan menurut Dirjen Perhubungan Darat (1989), adalah fasilitas parkir kendaraan yang tidak berada pada badan jalan atau langsung menempati pada badan jalan, tetapi berada di luar badan jalan yang dibuat khusus.

2. Parkir di Badan jalan

Parkir di badan jalan ini mengambil tempat di sepanjang jalan, dengan atau tanpa melebarkan jalan untuk fasilitas parkir. Parkir dengan sistem ini dapat ditemui di kawasan perumahan maupun dipusat kegiatan, dan juga kawasan lama yang pada umumnya tidak siap menampung perkembangan jumlah kendaraan seperti halnya di Jalan Braga yang menggunakan Parkir Meter. Parkir di tepi ini menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan dekat dengan tempat yang dituju. Tetapi idealnya parkir sistem ini harus dihindari, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Mengurangi kapasitas jalan.
- b. Memperpanjang waktu tempuh dan memperbesar angka kecelakaan.

Meskipun begitu beberapa parkir di jalan masih diperlukan dan bila keadaan jalan masih memungkinkan, yaitu pada jalan-jalan yang arusnya tidak melebihi 400 kendaraan/jam atau pada lalu lintas searah dengan arus kurang dari 600 kendaraan/jam, parkir pada salah satu sisi masih diperbolehkan jika tempat pejalan kaki yang berdekatan dengan tidak terlalu ramai dan terdapat sedikit pejalan kaki yang menyebrang jalan bila dari posisi parkir menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat, (1998) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu:

2.2.6 Konsep Terminal Parkir Elektronik

Terminal Parkir Elektronik (TPE) atau sering disebut e-parkir adalah sistem parkir berbasis meter yang bekerja secara elektronik dan dirancang dengan sistem komputerisasi secara real time. TPE dilengkapi dengan fitur layar video berwarna, pembayaran dengan pemindai kartu uang elektronik atau e-money, tombol yang dikendalikan *software*, *keyboard* alfanumerik dan pengantar suara. TPE berbentuk balok setinggi kurang lebih 1,5 meter berwarna merah. TPE hanya menerima pembayaran melalui kartu uang elektronik yang saldonya mencukupi sesuai dengan kebutuhan pelayanan parkir yang diperlukan. Kartu uang elektronik yang dimaksud terdiri dari beberapa jenis yang masing-masing diterbitkan oleh bank, baik bank swasta maupun bank pemerintah. Jenis kartu uang elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran pelayanan parkir TPE antara lain:

1. Brizzi dari Bank BRI
2. *E-Money* dari Bank Mandiri
3. *Tapcash* dari Bank BNI

Berdasarkan pernyataan *San Fransisco Municipal Transportation Agency* dalam **Kireina (2017:8)**, tujuan dari *smart parking system* adalah untuk memudahkan pengelolaan parkir. Berikut ini elemen dasar dan manfaat *smart parking system*: (1) *Easier payment methods*, artinya membuat kemudahan dalam hal pembayaran, karena proses pembayarannya menggunakan kartu *e-money*; (2) *Improved muni speed and reliability*, artinya membantu mempercepat proses perparkiran dan pembayarannya, terutama dalam kondisi yang ramai; (3) *Reduced illegal parking*, artinya dapat mengurangi parkir liar, karena tersedianya ruang khusus parkir di dekat TPE); (4) *Improved safety for all road users*, artinya dapat menanggulangi bahaya kecelakaan yang sering terjadi di jalan; (5) *Increasing economic vitality and competitiveness*, artinya dapat meningkatkan akses ke area komersil yang ramai.

2.3 Kerangka Berfikir dan Proposisi

2.2.1 Kerangka Berfikir

Pada penyusunan usulan penelitian ini peneliti mengacu kepada pendapat para ahli mengenai teori-teori yang berhubungan dengan fokus penelitian dan lokus penelitian, sebagai dasar dan pedoman ini sesuai dengan kenyataan dilapangan sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang objektif berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan diatas maka peneliti mengemukakan teori-teori dari para ahli yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai kerangka berpikir

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung. Program mesin parkir elektronik ini membuat lahan parkir mudah disinggahi, menambah retribusi parkir daerah. Untuk dapat mengukur imple Program Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung Oleh Dinas Perhubungan implementasi kebijakan terkait program ini, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dari Edward III. Peneliti menggunakan teori ini karena peneliti menganggap teori ini paling relevan dan memadai dengan indikasi penelitian yang ditemukan peneliti.

Dalam derajat lain **Mazmanian dan Sabatier** dalam **Agustino (2014:139)** mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut :

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang – undang, namun dapat pula berbentuk perintah – perintah atau keputusan – keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implemantasinya.”

Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan **Van Meter dan van Horn** yang dikutip oleh **Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15)** bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi variabel besar, yakni:

a) Isi kebijakan (content of policy), yang mencakup:

(1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan, (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, (4) apakah letak sebuah program sudah tepat, (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya secara rinci, (6) apakah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

b) Lingkungan implementasi (context of implementation), mencakup

(1) seberapa besar kekuasaan,kepentingan,dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan, (2) karakteristik institusi dalam rejim yang sedang berkuasa, (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini penelitian dapat menjelaskan variabel-variabel keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

1) Isi kebijakan (content of policy), yang mencakup:

- a) Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.

Dalam pengertian ini, kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan oleh masyarakat atau kelompok untuk memecahkan masalah yang terjadi di kehidupannya. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat atau kelompok banyak sekali masalah yang membelenggu dan butuh kebijakan yang dibuat pemerintah. Disini kebijakan yang sangat dibutuhkan harus terlaksana agar mengeluarkan masyarakat dari masalah tersebut.

- b) Jenis manfaat yang diterima oleh target group.

Suatu kebijakan adalah upaya untuk memperbaiki keadaan, jika keadaan yang diterima masyarakat atau kelompok tidak jauh berbeda dari sebelumnya, maka manfaat dari kebijakan tersebut tidak ada.

- c) Perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.

Kebijakan publik yang berhasil bukan dinilai dari isinya yang prestisius namun implementasinya di lapangan. Apakah mampu membawa perubahan yang baik atau malah sebaliknya.

- d) Ketepatan sebuah program.

Sebuah program kebijakan harus tepat agar nanti dalam implementasinya berhasil sesuai dengan harapan. Tepat disini meliputi, tepat sasaran, tepat kebutuhan, tepat lingkungan dan tepat guna

- e) Rincian implementor kebijakan.

Kebijakan yang sudah dibuat tidak bisa dinilai keberhasilannya tanpa ada implementor atau pelaksananya. Karena peran implementor sangat penting, tanpa mereka implementasi kebijakan tidak berjalan. Implementor tak cuma satu tapi ada beberapa, maka harus lengkap karena masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda yang saling melengkapi.

- f) Dukungan dari sumber daya yang memadai.

Sumber daya manusia (implementor) harus memadai dan tahu peran dan fungsinya secara baik agar tidak keliru. Selain itu sumber daya modal harus sesuai kemampuan agar tidak terjadi kekurangan uang untuk menunjang implementasi kebijakan.

2) Lingkungan implementasi (context of implementation), mencakup:

- a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat didalam implementasi kebijakan.

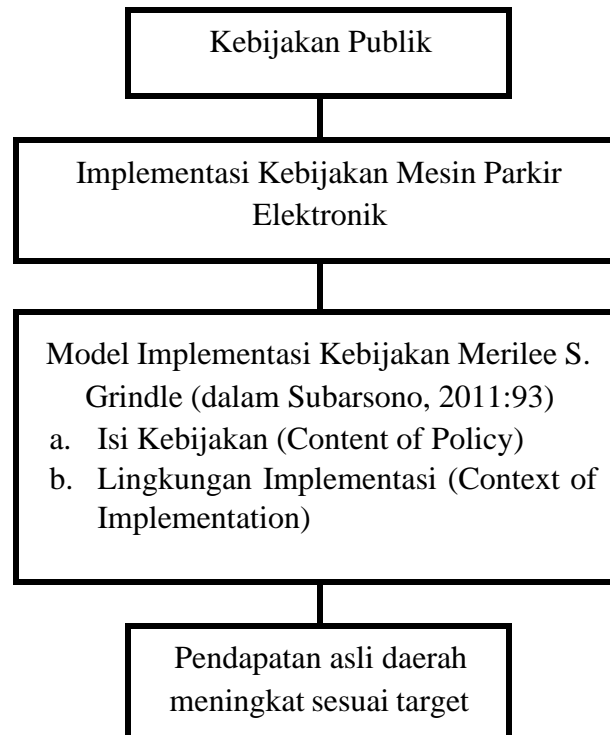
Dalam hal ini para aktor kebijakan yang jumlahnya lebih dari satu pasti memiliki pemikiran yang beraneka ragam. Sehingga masing-masing memiliki kepentingan dan strategi yang berbeda. Karena mereka terikat pada jabatan yang mereka punya. Sehingga berdampak pada kebijakan yang dibuat. Besar kecilnya tersebut ditentukan oleh jabatan yang mereka duduki.

- b) Karakteristik institusi dalam rezim yang sedang berkuasa.

Dalam politik negara nama rejim itu tergantung pada penguasa negara yang sedang menjabat. Maka perilaku dan sifat pemimpin negara dapat dilihat pada kebijakan yang dibuat. Dalam suatu rezim, institusi selaku kaki tangan kepala negara maka akan sangat nurut dengan kepala negara dan sistem yang ditentukan kepala negara.

- c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Dalam impementasi kebijakan publik, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena perilaku masyarakat (kelompok sasaran) sangat menentukan.



Pada bagan diatas dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan retribusi mesin parkir elektronik di Kota Bandung khususnya di Jl. Lengkong Kecil perlu di analisa melalui teori dari Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) agar permasalahan yang terjadi pada implementasi kebijakan retribusi mesin parkir elektronik di Kota Bandung dapat dipecahkan. Sehingga dapat di evaluasi untuk kemudian hasil dari evaluasi tersebut dapat memunculkan hasil berupa pendapatan asli daerah yang meningkat sesuai dengan target yang sudah di tetapkan.

2.2.2Proposisi

Berdasarkan uraian konsep dan teori yang telah peneliti uraikan pada kerangka pemikiran, maka peneliti merumuskan proposisi agar pendapat asli daerah meningkat sesuai dengan target maka dari itu implementasi kebijakan

program mesin parkir elektronik di Kota Bandung (studi kasus Jl. Lengkong Kecil) diukur menggunakan model yaitu : Isi kebijakan dan Lingkungan kebijakan.